



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERBAIKAN TATA NIAGA PERDAGANGAN BAWANG PUTIH

Ari Mulianta Ginting
Analisis Legislatif Ahli Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Selama tahun 2023 terjadi fluktuasi harga pangan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Kenaikan harga pangan pada saat pendapatan masyarakat cenderung stagnan maka hasilnya adalah penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini mendorong perlunya stabilisasi harga pangan dengan menggunakan instrumen yang ada. Secara moral, stabilisasi pangan merupakan suatu keharusan sedangkan secara konsitusional, stabilisasi pangan merupakan suatu kewajiban. Secara keseluruhan, harga pangan yang stabil berdampak terhadap ekonomi dibandingkan situasi pangan yang mengalami kondisi fluktuasi. Salah satu harga pangan yang mengalami kondisi fluktuasi di tahun 2023 adalah komoditas bawang putih.

Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG) menjelaskan paling tidak ada 5 (lima) dimensi stabilitas yang perlu untuk didorong agar terjadi stabilitas pangan secara keseluruhan. *Pertama*, stabilitas pendapatan petani. *Kedua*, stabilitas sumber daya pangan. Stabilitas lahan pertanian pangan luasan, dan kesuburan menjadi hal yang penting dan merupakan kunci dari stabilitas pangan. *Ketiga*, stabilitas produksi pangan. Perencanaan dan pengelolaan produksi pangan yang cerdas dan realistis harus dapat memenuhi kebutuhan konsumen. *Keempat*, stabilitas ketersediaan pangan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan; dan *Kelima*, stabilitas pasokan pangan secara keseluruhan.

Konsep stabilitas yang diuraikan oleh Dirut Perum BULOG menjadi wacana dan rencana yang baik, namun pada tahap realisasi masih perlu banyak penyempurnaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil investigasi lembaga Ombudsman Republik Indonesia (RI) tentang penerbitan impor dan wajib tanam bawang putih. Ombudsman RI menemukan temuan terkait dugaan pungutan liar dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultur (RIPH) Bawang Putih. Dalam laporannya, Ombudsman RI menunjukkan pelaku usaha dibebankan pungutan ilegal sebesar Rp200,00–Rp250,00 per kilogram (kg) dari besaran RIPH yang ingin diterbitkan.

Yeka Hendra Fatika, salah satu anggota Ombudsman RI, menyatakan bahwa jual beli kuota dalam penerbitan RIPH membuat penerbitan RIPH komoditas bawang putih melebihi rencana awal impor komoditas bawang putih. Kondisi ini berdampak terhadap rencana impor melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi terbatas tingkat Menko. Sebagai contoh pada tahun 2023, pemerintah menetapkan kebutuhan impor bawang putih sebanyak 560.000 ton, namun realisasi RIPH diterbitkan jauh melebihi kuota yaitu 1,2 juta ton sepanjang tahun 2023. Kondisi ini jelas menimbulkan permasalahan dalam tata niaga bawang putih di Indonesia, rebutan kuota impor jelas berdampak terhadap pelaku usaha merugi.

Atensi DPR

Hasil temuan Ombudsman RI terkait perdagangan komoditas bawang putih ditemukan beberapa hal. Diantaranya adalah adanya dugaan liar terkait penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultur (RIPH) terkait impor komoditas bawang putih di Indonesia. Temuan Ombudsman menemukan bahwa pelaku usaha dibebankan pungutan ilegal sebesar Rp200,00 – Rp250,00 per kg dari besaran RIPH yang ingin diterbitkan. Komisi VI DPR RI harus melakukan investigasi dan melakukan perbaikan perdagangan bahan pangan khususnya komoditas bawang putih.

Perbaikan tata niaga dan perdagangan komoditas pangan bawang putih harus dapat diperbaiki. Langkah awal Komisi VI DPR RI dapat memanggil *stakeholder* terkait untuk memetakan masalah dan mencari solusi permasalahan tersebut. Hal ini dibutuhkan agar pada tahun 2024 hal ini dapat dihindari dan stabilitas harga pangan khususnya komoditas bawang putih dapat terjadi baik melalui produksi maupun impor.

Sumber

Bisnis Indonesia 21 Januari 2024;
Kontan.co.id, 21 Januari 2024;
Kompas, 18 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024